



PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, RISIKO KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DESA

Anwar Arifin Pinem, Siti Rahmayuni, Henny Okta Piyan, Naya Thalita Ramadhani
Universitas Mulia, Indonesia

Corresponding Author Email : anwararifin@universitasmulia.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan desa dan pengaruh risiko keuangan terhadap kinerja keuangan desa Siderejo Kabupaten Penajam Pasir Utara. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Analisis data akan dilakukan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa dan risiko keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa

Kata Kunci: Corporate Governance, Risiko Keuangan, Desa, Kinerja Keuangan, Manajemen

Pendahuluan

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencakup kemampuan suatu daerah untuk mengumpulkan dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhan yang mendukung operasional pemerintahan, layanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah, tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggunakan dana-dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kinerja keuangan daerah di ukur dengan Penilaian keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada laporan keuangan yang telah disajikan, tetapi juga memerlukan pengukuran kinerja yang terkait. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem pengukuran kinerja keuangan sektor publik. Sistem ini dirancang untuk membantu mengukur dan mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil dalam mengelola keuangannya.

Dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, akan melibatkan berbagai indikator dan metrik yang mencakup efisiensi penggunaan anggaran, tingkat pencapaian tujuan keuangan, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta dampak dari kebijakan keuangan yang diterapkan. Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja dan memberikan dasar untuk perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan publik.

Desa Siderejo merupakan desa di Kecamatan Penajam Pasir Utara berdiri selama 14 tahun namun seiring berjalananya waktu tata kelola administrasi dan perangkat desa belum sesuai dengan aturan dan yang menjadi risiko keuangan pada desa Siderejo adalah kredit macet yang mana masyarakat diberi pinjaman sebagai modal usaha namun ketika pembayaran mengalami kemacetan, hal ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa secara global

Srirejeki, Kiky (2015) menyatakan Tata kelola Pemerintahan Desa dimulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan dan pengawasan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Desa seharusnya bertindak transaparan, mulai dari tingkatan perencanaan hingga pelaksanaan. Segala kegiatan Desa dengan tujuan untuk kemakmuran Desa juga harus dapat dipertangungjawabkan. Dan Waruwu, et.al. (2023) bahwa tata kelola pemerintahan masih pada prinsip akuntabilitas dan transparasi masih belum maksimal pelaksanaan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa, prinsip demokasi dan aturan hukum sudah cukup maksimal penerapannya.

Tinjauan Pustaka

A. Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah suatu entitas hukum yang terdiri dari masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif dan hak asal usul atau tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang diberi otonomi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, menunjukkan usaha menuju kemandirian desa dalam menjalankan pemerintahannya. Pemerintah desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Desa.

B. Kinerja Keuangan

Keberhasilan atau kinerja suatu organisasi dianggap baik jika mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan kualitas atau standar yang tinggi, namun dengan biaya yang rendah. Dengan kata lain, organisasi dianggap berkinerja baik jika mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan cara yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Menurut Fahmi (2020), kinerja keuangan merujuk pada evaluasi sejauh mana suatu organisasi menjalankan kegiatan mereka dengan mematuhi aturan keuangan yang berlaku. Indikator kinerja harus memberikan manfaat baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, indikator tersebut berfungsi sebagai alat untuk menyoroti area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Sementara bagi pihak eksternal, indikator kinerja digunakan sebagai kontrol dan juga sebagai sumber informasi untuk mengukur tingkat akuntabilitas publik.

Kask dan Linton (2016) membagi kinerja atas beberapa tingkatan yaitu tidak berkinerja, kinerja rendah, kinerja menengah, dan kinerja tinggi. Penilaian kinerja bertujuan untuk menentukan efektivitas operasi perusahaan yang telah dilakukan. Kinerja non-keuangan,

mengukur kinerja dengan menggunakan satuan pengukuran non-keuangan seperti kepuasan pelanggan dan kepuasan pegawai. Sebaliknya kinerja keuangan menggunakan satuan pengukuran keuangan seperti laba tahun berjalan, return on asset, return on equity, dan sebagainya.

C. Corporate Governance

Seperangkat peraturan yang mengatur interaksi antara pemegang saham, pengurus perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, baik dari internal maupun eksternal perusahaan, terkait hak dan tanggung jawab mereka. Ini merupakan sistem yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi operasi perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat.

Hery (2017: 27), corporate governance merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena corporate governance yang baik dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

Kristian dan Yopi, (2018:149) Corporate governance juga merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan atau stakeholders lainnya

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan kepentingan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan yang sering disebut sebagai masalah keagenan, juga upaya untuk mengatasi perilaku manajemen dari sikap mementingkan diri sendiri bertujuan untuk menciptakan pengawasan dalam perusahaan yang memastikan adanya optimalisasi atas pemenuhan kepentingan stakeholder serta menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Corporate governance menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tata kelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, corporate governance dapat diartikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk mengelola risiko yang signifikan sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan bisnisnya melalui tata kelola dan sistem bekerja dengan baik dalam perusahaan, pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang.

D. Risiko Keuangan

Manajemen resiko di tingkat masyarakat di Desa Siderejo lebih difokuskan kepada pengurangan risiko dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan terutama pembangunan dibidang infrastruktur. Walaupun pada dasarnya cepat atau lambatnya anggaran masuk ke kas desa tidak bisa dikondisikan oleh perangkat desa sebagai kuasa pengguna anggaran, tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya menjadi tolok ukur bagus atau tidaknya hasil akhir dari suatu produk yang dibuat. Oleh karenanya, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi ketidak sempurnaan dalam pelaksanaan, perangkat desa selalu memberikan masukan-masukan tentang efekefek yang

diakibatkan jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak maksimal akan berpengaruh pada ketahanan dan lamanya dalam penggunaan hasil oleh masyarakat. Manajemen risiko di tingkat desa lebih mengutamakan pada aspek sosial,. Hal ini dikarenakan oleh kultur masyarakat yang ada di desa, apabila suatu pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan baik atau melanggar ketentuan yang berlaku maka sanksi sosial yang menjadi sanksi yang akan didapatkan.

Menurut Fahmi (2013; 220), manajemen peta risiko memiliki beberapa manfaat yang signifikan, yaitu:

1. Memberikan Landasan Kuat untuk Pengambilan Keputusan: Manajemen peta risiko memberikan perusahaan landasan yang kuat dalam mengambil setiap keputusan. Ini membuat manajer lebih berhati-hati dan selalu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.
2. Memberikan Arahan untuk Perusahaan: Manajemen peta risiko membantu perusahaan dalam memahami pengaruh yang mungkin timbul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini membantu perusahaan dalam merencanakan strategi dan mengambil langkah yang tepat untuk menghadapi risiko yang ada.
3. Mendorong Pengambilan Keputusan yang Berhati-hati: Manajemen peta risiko mendorong para manajer untuk selalu menghindari risiko dan upaya untuk mengurangi potensi kerugian dalam organisasi.
4. Mengurangi Risiko Kerugian: Dengan adanya manajemen peta risiko yang terperinci, perusahaan memiliki kemampuan untuk meminimalkan risiko kerugian. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah membangun mekanisme yang berkelanjutan untuk mengelola risiko secara efektif.

E. Hubungan Antar variabel

1. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Desa

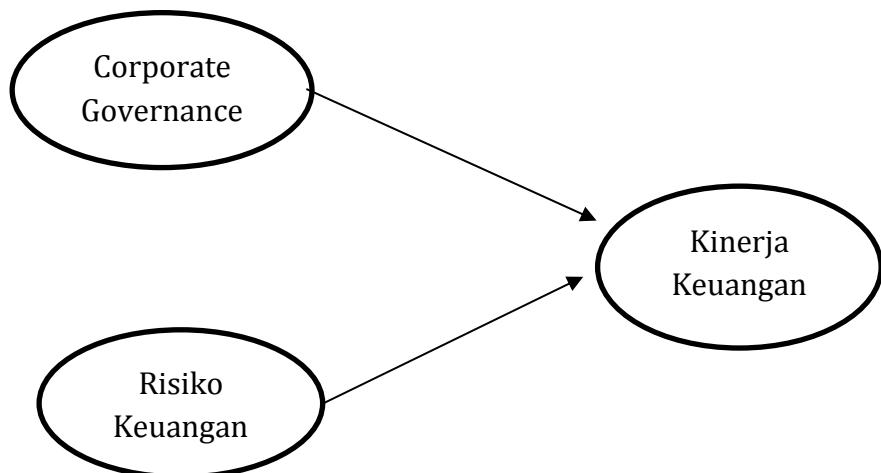
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di tingkat desa memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan desa. Utomo, (2018) Menurut menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan potensi investasi.

2. Pengaruh Risiko Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Desa

Pengaruh risiko keuangan terhadap kinerja keuangan desa merupakan studi yang mengkaji bagaimana faktor-faktor risiko keuangan, seperti fluktuasi pendapatan, utang, inflasi, atau ketidakpastian ekonomi, memengaruhi kondisi keuangan sebuah desa. Ini penting karena risiko keuangan dapat mempengaruhi kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk, menyediakan layanan publik, dan melaksanakan proyek pembangunan. Basri, (2021) menyatakan hasil penelitiannya bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini mencoba menguji pengaruh corporate governance dan risiko keuangan terhadap kinerja keuangan desa. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Hipotesis

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang dapat di uji. hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Corporate Governance Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Desa
2. Risiko Keuangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Desa

Metode

Metode Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif regresi linear berganda dengan populasi dan sample sebanyak 42 Orang pengurus dan anggota perangkat desa, Penelitian ini di lakukan di Desa Sidorejo Kabupaten Penajam pasir utara,

Hasil

Desa Sidorejo adalah bagian dari Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan daerah transmigrasi pada tahun 1957/1958 dengan basis pertanian. Awalnya, Desa Sidorejo adalah bagian dari Kelurahan Petung dan dikenal dengan nama Kedung Rejo. Nama "Kedung" berarti genangan atau kolam, karena wilayah ini dulunya merupakan daerah rawa, dan "Rejo" berarti ramai. Pada tanggal 8 Februari 2010, Desa Sidorejo resmi dimekarkan dari Kelurahan Petung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Sidorejo di Kecamatan Penajam. Dengan pemekaran ini, desa yang dulunya bernama Kedung Rejo berdiri sendiri dengan nama Sidorejo, yang berarti "Jadi Ramai," dengan harapan menjadi desa yang ramai, makmur, dan berkembang. Nama Kedung Rejo kini diabadikan sebagai nama salah satu dusun di Desa Sidorejo.

Analisis Regresi Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
			Square	Estimate
1	.870 ^a	.756	.738	1.140

a. Predictors: (Constant), Corporate_Governance, Risiko Keuanga,

Berdasarkan Hasil tabel di atas bahwa variable Corporate Governance dan Risiko Keuangan mempengaruhi Variabel Kinerja Keuangan sebesar 75,8 % selebihnya didukung oleh variable lainnya

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.354	1.392		.254	.800
	Corporate_Governance	.254	.113	.233	2.255	.030
	Risiko_Keuangan	.383	.119	.390	3.222	.002

a. Dependent Variabel: Kinerja_Keuangan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.354 + 0.254X1 + 0.383X2$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai konstan yang merepresentasikan nilai kinerja keuangan (Y) ketika nilai dari kedua variabel independen, yaitu corporate governance (X1) dan risiko keuangan (X2), adalah nol. Dalam konteks model yang diberikan, intercept memiliki nilai sebesar 0.354. Ini berarti bahwa jika sebuah perusahaan memiliki nilai corporate governance dan risiko keuangan yang masing-masing adalah nol, kinerja keuangannya diperkirakan berada pada nilai 0.354.

Pembahasan

Tabel koefisien dari hasil analisis regresi linier menunjukkan hubungan antara kinerja keuangan dengan dua variabel independen: corporate governance dan risiko keuangan. Nilai intercept sebesar 0.354 tidak signifikan secara statistik ($p\text{-value} = 0.800$), menunjukkan bahwa kinerja keuangan ketika corporate governance dan risiko keuangan bernilai nol tidak memberikan informasi yang signifikan. Namun, corporate governance memiliki koefisien sebesar 0.254 yang signifikan ($p\text{-value} = 0.030$), menandakan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam corporate governance akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0.254 unit. Risiko keuangan memiliki koefisien yang lebih tinggi, yaitu 0.383, dan sangat signifikan secara statistik ($p\text{-value} = 0.002$), menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam risiko keuangan akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0.383 unit. Koefisien terstandarisasi menunjukkan bahwa risiko keuangan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kinerja keuangan dibandingkan dengan corporate governance. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa baik corporate governance maupun risiko keuangan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan risiko keuangan memberikan pengaruh yang lebih dominan.

Untuk desa Disiderejo, hasil ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperbaiki tata kelola desa dan mengelola risiko keuangan dengan lebih baik dapat secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan. Pemimpin desa mungkin perlu fokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga, serta mengembangkan strategi untuk mengelola risiko keuangan secara efektif. Ini bisa mencakup pelatihan untuk pengelolaan keuangan, penerapan sistem akuntansi yang lebih baik, dan evaluasi risiko yang lebih mendalam dalam keputusan investasi. Hal ini sesuai dengan hipotesis

1. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Desa

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di tingkat desa memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan desa. Utomo, (2018) Menurut menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan potensi investasi.

2. Pengaruh Risiko Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Desa

Pengaruh risiko keuangan terhadap kinerja keuangan desa merupakan studi yang mengkaji bagaimana faktor-faktor risiko keuangan, seperti fluktuasi pendapatan, utang, inflasi, atau ketidakpastian ekonomi, memengaruhi kondisi keuangan sebuah desa. Ini penting karena risiko keuangan dapat mempengaruhi kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk, menyediakan layanan publik, dan melaksanakan proyek pembangunan. Basri, (2021) menyatakan hasil penelitiannya bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Secara keseluruhan, memahami pengaruh dari corporate governance dan risiko keuangan pada kinerja keuangan desa dapat membantu pemimpin desa Disiderejo membuat keputusan yang lebih informasi dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa.

Kesimpulan

Untuk meningkatkan kinerja keuangan desa Disiderejo, penting untuk fokus pada peningkatan tata kelola desa, seperti meningkatkan transparansi, partisipasi warga, dan akuntabilitas pemimpin desa. Selain itu, pengelolaan risiko keuangan yang efektif, termasuk diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan risiko investasi, juga sangat penting. Dengan demikian, desa Disiderejo dapat mencapai kinerja keuangan yang lebih baik melalui upaya perbaikan tata kelola dan pengelolaan risiko yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan keuangan desa: analisis faktor yang mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34-50.
- Fahmi, Irham. 2013. Manajemen Risiko:Teori, Kasus dan Solusi. Alfabeta.
- Sirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. Jurnal akuntansi dan bisnis, 15(1), 33-37.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta,Bandung
- Utomo, K. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 13(1), 50-66.
- UU No 3 Tahun 2024 Tentang Desa
- Waruwu, M. H., Gulo, S., Lahagu, P., Halawa, O., & Laia, O. (2023). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 44-47.